

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Asshiddiqie, Jimly, 2004, *Perihal Undang-Undang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta.

Ardhiwisastro, Bhakti, 2000, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung.

Astawa, I Gde Pantja dan Na,a Suprin, 2008, *Dinamika Hukum dan dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.

Atmosudirdjo, Prajudi, 1986, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Bungin, Burhan, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hadjon, Philipus M, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Cetakan Pertama, PT Bina Ilmu, Surabaya.

_____, 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Hoesein, Zainal Arifin, 2009, *Judicial Review di Mahkamah Agung*, Rajawali Pers, Jakarta.

Imanuel, Victor, 2013, *Konsep Uji Materil*, Setara Press, Malang.

Indroharto, 1996, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Ishaq, 2010, *Pendidikan Keadvokatan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Kelsen, Hans, 2010, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung.

Kreveld, J.H. Van, 1983, *Beleidsregel In Het Recht*, Deventer, Kluwer.

- Latif, H. Abdul, 2005, *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidregel) Pada Pemerintahan Daerah*, UII Press, Yogyakarta.
- Lubis, M. Solly, 1977, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Alumni, Bandung.
- Lev, Daniel S, 2001, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia*, Jakarta.
- Mahfud, Mohammad, 2007, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, LP3ES, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2008, *Peraturan Kebijakan*, Varia Peradilan, Jakarta.
- Manan, Bagir dan Magnar, Kunta, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung.
- _____, 1987, *Peranan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Armico.
- Marbun, S.F, 2014, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Marzuki, Laica, 2010, *Peraturan Kebijakan (Beleidsregel): Hakikat serta Fungsinya Selaku Sarana Hukum Pemerintahan*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2011, *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cetakan 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- PERADI, 2007, *Kitab Advokat Indonesia*, PERADI, Bandung.
- Pandu, Yudha, 2004, *Klien dan Advokat dalam Praktek*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta.
- Panggabean, Henry, 2001, *Fungsi Mahkamah Agung*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Pompe, Sebastian, 2012, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, Jakarta.

- Purbopranoto, Kuntjoro, 1978, *Beberapa catatan Hukum Tata Pemerintah dan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung.
- Rahadjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rambe, Ropaun, 2001, *Teknik Praktek Advokat*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Ridwan, 2014, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Ridwan, HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ruslan, Ahmad, 2011, *Teori dan Panduan Praktek Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Sarmadi, H. A. Sukris, 2009, *Advokat (Litigasi & Non Litigasi Pengadilan) Menjadi Advokat Indonesia Kini*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Sibuea, Hotma P, 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Erlangga, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soemantri, Sri, 1997, *Hak Uji Material di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati, 1998, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Subekti, R, 1980, *Kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Sulaiman, King Faisal, 2017, *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Sumardjono, Maria SW, 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sunny, Ismail, 1983, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Aksara Baru, Jakarta.
- Thalhah, H.M dan Malian, Sobirin, 2011, *Perkembangan Lembaga-Lembaga Negara di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 2002, *Hukum, Pyudhsaaradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSA-HUMA, Jakarta.

Winarta, Frans Hendra, 2000, *Advokat Indonesia, Citra, Idealisme, dan Keprihatinan*, PT. Elex Media, Jakarta.

Wlas, Lasdin, 1989, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Liberty, Yogyakarta .

Wojowasito S, 2000, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

Makalah/Skripsi:

Annisa, Arini Nur, “Tinjauan yuridis Kewenangan Mahkamah Agung Terhadap Hak Uji Materil Surat Edaran Direktur Jendral Mineral Batu Bara dan Panas Bumi No.03/E/31/DJB/2009 tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batu Bara”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.

Arif, Andry Rahman, “Eksistensi Wadah Tunggal Organisasi Advokat dalam Sistem Peradilan di Indonesia”, *Tesis*, Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lampung, 2016.

Attamimi, Hamid S, “Teori Perundang-undangan: Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan Indonesia yang Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahaman”, *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta, 25 April 1992.

Lukman, Markus, *Freies Ermessen dalam Proses Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Kota di Kotamadya Pontianak*, *Tesis*, , Program Magister pada Fakultas Pascasarjana Universitas Padjajaran, 1989.

Santosa, Dewa Gede Giri, “Analisis Yuridis Implikasi Eksistensi Organisasi Advokat Terhadap Pengambilan Sumpah Advokat di Pengadilan Tinggi Yogyakarta”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum UGM Yogyakarta, 2015.

Artikel/Jurnal:

Anonim, “Kisruh Wadah Tunggal Advokat”, *Warta BPK*, Edisi 02, Februari 2011, Jakarta.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1997, *Analisis dan Evaluasi tentang Kode Etik Advokat dan Konsultan Hukum*, Penerbit BPHN, Jakarta.

Bagir Manan, “Penelitian di Bidang Hukum”, *Jurnal Puslitbangkum*, Januari 1999, Bandung.

Samosir, Samuel Saut Martua, “Organisasi Advokat dan Urgensi Peran Pemerintah dalam Profesi Advokat”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, Nomor 3, September 2017, Jakarta.

Internet:

Anonim, <https://peradri.org/badan-hukum/>, diakses pada tanggal 29 Desember 2019.

Anonim, “DPN P3HI (Perkumpulan Pengacara dan Penasehat Hukum Indonesia) Segera Pleno Sikapi Sejumlah Anggota Pindah Ke Organisasi Lain”, <https://www.suarakalimantan.com/2019/10/dpn-p3hi-segera-pleno-sikapi-sejumlah-anggota-pindah-ke-organisasi-lain/www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 20 November 2019.

Asshiddiqie, Jimly, “Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia”, <http://www.jimlyschool.com/read/analisis/238/kedudukanmahkamah-konstitusi-dalam-struktur-ketatanegaraan-indonesia/>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2019.

Moch. Dani Pratama Huzaini, “Soal Kualitas Advokat Dinilai Menurun, Ini Jawaban Mahkamah Agung”, www.hukumonline.com pada tanggal 22 Januari 2020.

Perhimpunan Advokat Indonesia, “Sejarah Peradi”, www.peradi.or.id, diakses pada tanggal 28 Mei 2019.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang *Mahkamah Agung*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3316.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang *Peradilan Tata Usaha Negara*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3344.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang *Advokat*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4288.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9*, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4359.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang *Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4958.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang *Administrasi Pemerintahan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang *Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah*

Risalah Sidang Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVI/2018 pada tanggal 17 Desember 2018

Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 052/KMA/HK.01/III/2011 tentang *tentang Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2011*.

Putusan-Putusan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-VIII/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XIII/2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVI/2018.